

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan adanya berbagai jenis bantuan dana dari luar negeri masih dirasa tidak mencukupi kebutuhan besarnya keperluan dana untuk pembangunan tersebut. Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, dana untuk keamanan dan fasilitas di bidang kesehatan.

Struktur Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), didalamnya ada dua pos penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang sebenarnya lebih tepat disebut bantuan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri, disamping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan

untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama bagi penerimaan negara menjadi sumber penerimaan yang kurang diprioritaskan.

Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Sektor pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lain.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang dengan benar dan dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan mempermudah dalam pengelolaan pajak dan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunannya.

Salah satu lapisan masyarakat yang tidak kecil peranannya dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah perusahaan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan tersebut bergerak diberbagai bidang usaha, antara lain pabrikasi (manufaktur), perdagangan dan jasa.

Sejak tahun 1983 Indonesia menganut *Self Assesment System* sebagai sistem pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perhitungan pajak oleh Wajib Pajak tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban menurut ketentuan perpajakan untuk suatu tahun/ masa pajak.

Salah satu pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan suatu usaha adalah Pajak Penghasilan (PPH). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan untuk mempermudah penentuan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir (Mardiasmo, 2002).

Pembukuan yang baik dan tertib merupakan salah satu prasyarat berhasilnya *Self Assessment System*. Mengingat belum semua pengusaha perseorangan mampu menyelenggarakan pembukuan, maka pemerintah mengambil suatu kebijakan sebagai pengganti pembukuan yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN). Norma tersebut merupakan perkiraan laba bersih yang diperoleh pengusaha perseorangan selama satu Tahun Pajak. Kebijakan ini hanya diperbolehkan bagi para pengusaha perseorangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: mempunyai peredaran bruto dalam satu Tahun Pajak kurang dari Rp. 600.000.000,00; mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku dan menyelenggarakan pencatatan.

Penelitian mengenai penghitungan penghasilan neto, sepengetahuan penulis sudah pernah dilakukan, diantaranya Suranto (2004) berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memilih metode penghitungan penghasilan neto. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pengertian terhadap pajak, tarif pajak, biaya pembukuan, tenaga pembukuan, kepentingan dan kesulitan pembukuan, kesederhanaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Surat Pemberitahuan (SPT), petugas pajak, kemungkinan pemeriksaan dan demografi (perilaku). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh secara parsial terhadap pemilihan metode untuk menentukan penghasilan bersih adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), perilaku, dan tarif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Heny (2004) berusaha untuk mengetahui pengaruh dari faktor jenis usaha, jumlah peredaran bruto selama satu tahun, dan tingkat pendidikan (tahun sukses) terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi dalam menentukan cara perhitungan pajak penghasilan serta mengetahui apakah ada perbedaan mengenai besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi apabila menggunakan pembukuan atau norma penghitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto selama satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jumlah peredaran bruto berpengaruh (mempunyai efek) signifikan secara statistik terhadap penentuan perhitungan pajak penghasilan di wilayah Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Surakarta.

Penelitian ini mengambil 10 variabel independen dari penelitian Suranto (2004) yaitu pengertian terhadap pajak, tarif pajak, biaya pembukuan, tenaga pembukuan, kepentingan dan kesulitan pembukuan, kesederhanaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Surat Pemberitahuan (SPT), petugas pajak, kemungkinan pemeriksaan, dan demografi (perilaku), dan 1 variabel independen yang diambil dari penelitian Heny (2004) yaitu jumlah peredaran bruto selama satu tahun. Heny (2004) menggunakan 3 variabel independen, yaitu variabel jenis usaha, jumlah peredaran bruto selama satu tahun dan tingkat pendidikan (tahun sukses). Penulis hanya mengambil satu variabel independen dari penelitian Heny (2004) yaitu variabel jumlah peredaran bruto selama satu tahun. Penulis tidak memasukkan variabel jenis usaha dan tingkat pendidikan dari penelitian Heny (2004), alasannya (1) untuk

variabel jenis usaha, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan, dan (2) untuk variabel tingkat pendidikan, dalam penelitian Heny (2004) menemukan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan cara perhitungan PPh terutang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENENTUKAN CARA PERHITUNGAN PPh TERUTANG DI MADIUN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh dari pemahaman terhadap pajak, tarif pajak, biaya pembukuan, tenaga pembukuan, kepentingan dan kesulitan pembukuan, kesederhanaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Surat Pemberitahuan (SPT), petugas pajak, kemungkinan pemeriksaan, demografi (perilaku) dan jumlah peredaran bruto selama satu tahun terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi (yang melakukan usaha perdagangan) dalam menentukan cara perhitungan PPh terutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang terdiri dari: pemahaman terhadap pajak, tarif pajak, biaya pembukuan, tenaga pembukuan, kepentingan dan kesulitan pembukuan, kesederhanaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Surat Pemberitahuan (SPT), petugas pajak, kemungkinan pemeriksaan, demografi (perilaku) dan jumlah peredaran bruto selama satu tahun terhadap keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan cara perhitungan PPh terutang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi secara empiris mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi seperti pemahaman terhadap pajak, tarif pajak, biaya pembukuan, tenaga pembukuan, kepentingan dan kesulitan pembukuan, kesederhanaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Surat Pemberitahuan (SPT), petugas pajak, kemungkinan pemeriksaan, demografi (perilaku) dan jumlah peredaran bruto selama satu tahun dalam menentukan cara perhitungan PPh terutang di wilayah Kabupaten dan Kota Madiun.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai metode perhitungan yang akan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang.

## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dan pada masing-masing bab tersebut akan diuraikan mengenai hal-hal seperti berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang telaah teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; instrumen penelitian; lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengenai hasil uji kualitas data, uji asumsi klasik dan hasil penelitian yang mengungkapkan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.